

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



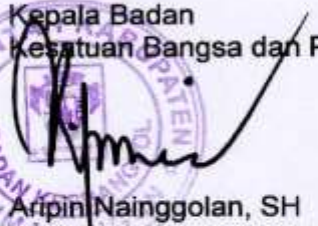
KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepa Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Sasaran Strategis, Indikator, Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang berorientasi pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun ini telah diupayakan selengkap mungkin, namun demikian tidak terlepas dari kekurangan baik penyajian maupun substansi data, untuk itu hasil evaluasi laporan kinerja ini selain memberikan gambaran pencapaian kinerja juga sebagai media evaluasi bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan kinerja.

Pamatang Raya, Februari 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Arpin Nainggolan, SH
NIP. 196701181996101001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa
2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat

Berikut rincian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	82%	80%	80%
2	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80%	80%	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, melalui Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kendala yang dialami adalah Kurangnya Pengetahuan, Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Etika Politik di Tengah Tengah Masyarakat Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat dan juga melaksanakan

Monitoring ke Kecamatan. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp. 69.736.944.261,- atau 99% dari Rp. 70.440.676.904,- yang telah dialokasikan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontingensi daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Simalungun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	3
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026	12
2.2. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun	18
3.1.1. Pengukuran Kinerja	18
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	19
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	39
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	40
Lampiran 2. Pohon Kinerja Tahun 2024.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026	13
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..	14
Tabel 2.3.	Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun.....	14
Tabel 2.4.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	16
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024	17
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 3.3.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024	19
Tabel 3.4.	Daftar Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Tahun 2024	22
Tabel 3.5.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 2 tahun 2024	25
Tabel 3.6.	Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2024.....	27
Tabel 3.7.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2024	28
Tabel 3.8.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2024.....	29
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	30
Tabel 3.10	Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional.....	31
Tabel 3.11	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	31
Tabel 3.12	Penyajian atas penggunaan Sumber Daya.....	33
Tabel 3.13	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
Tabel 3.14	Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	36
Tabel 3.15	Perbandingan capaian realisasi anggaran 2021 – 2024.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

.Pemerintah adalah organisasi public yang memproduksi barang dan jasa berupa layanan pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangannya , sehingga dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu organisasi pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan LKIP sebagai wujud responsibilitas dan akuntabilitas kinerjanya kepada publik

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 terkait program yang diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun tahun 2024 sesuai RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2024, yang secara operasional disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Simalungun **“Rakyat Harus Sejahtera”**

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Memberikan gambaran dan Informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang baik dengan Instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga pada evaluasi kinerja;

5. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan tingkat kekurangan capaian kinerja atas pelaksanaan program atau kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun;
6. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat)

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten Dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas yaitu :
Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan tugas dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan Fungsi

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a. Kepala Badan

Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan tugas dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan Fungsi

b. Sekretaris

Tugas: Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Penyusunan Program

Fungsi:

1. Mengoordinasikan dan menyusun program meliputi program anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Mengelola urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Sub Bagian Umum
- Tugas: Membantu Sekreris Badan dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, Tata Usaha dan Umum.
- Fungsi:
1. Melaksanakan Penatausahaan Administrasi Perkantoran
 2. Melaksanakan penatausahaan perkantoran
 3. Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hokum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Badan;
 4. Menyusun rencana kegiatan rumah tangga Badan
 5. Menyusun Perencanaan Kebutuhan perlengkapan rumah tangga
 6. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan.perawatan barang barang inventaris;
 7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- d. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- Tugas: Melaksanakan sebahagian tuga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tungkal Ika dan sejarah kebangsaan.
- Fungsi:
1. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 2. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 3. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 4. melaksanakan pengoordinasian di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah; dan
6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

e. Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas:

membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Fungsi:

1. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
2. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
3. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
4. melaksanakan pengoordinasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
Tugas: membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi

kemasyarakatan

Fungsi:

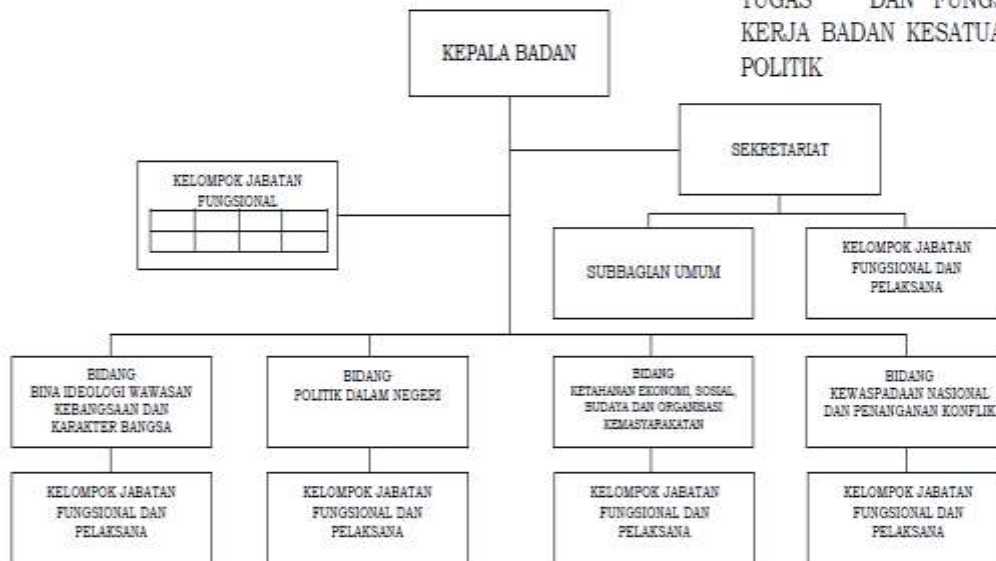
1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 4. Pelaksanaan pengoordinasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- g. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Tugas: membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan kewaspadaan nasional dan perlindungan masyarakat

Fungsi:

1. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
2. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
3. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
4. pelaksanaan pengoordinasian di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 33 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK

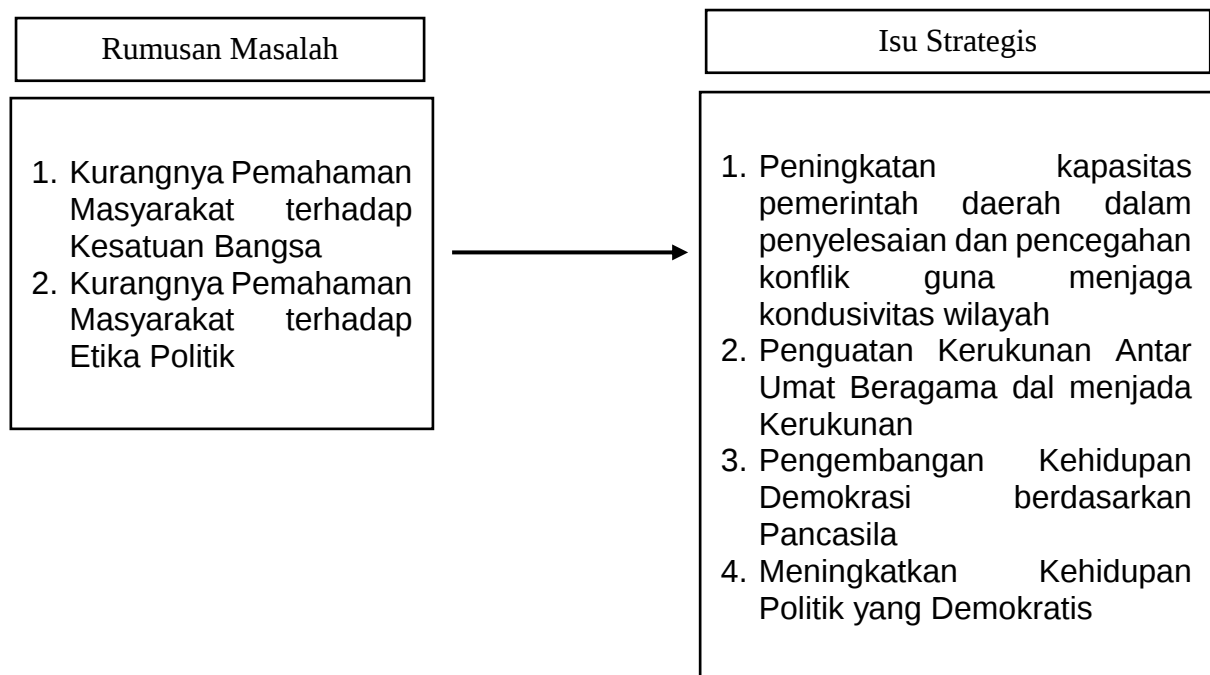


Gambar 1. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah yang terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun.

Isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan Utama (strategic issue) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran/Capaian Kinerja Keuangan
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

Bab. IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran (Perjanjian Kinerja)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihan ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif
6. Peningkatan pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Milenial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APDB)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk

Sedangkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun disusun sebagai berikut : **“Terwujudnya suatu masyarakat**

yang sejahtera, berbudaya, berkepribadian dan demokratis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 3 (tiga) yaitu “Penerapan GCG (Good and Clear Government)”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik yang Demokratis	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	80	81	82	83	85
		Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis		76	79	80	83	83

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\text{Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam APBD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100\%$	RKPD APBD	Kesbangpol

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	A. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Meningkatkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multikultur 2. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
		Peningkatan kerukunan antar suku dan infrasuku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	1. Meningkatkan sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya

		Peningkatan Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan optimalisasi dan penggunaan media social untuk meredam konflik masyarakat melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat 2. Meningkatkan Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
	B. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	Peningkatan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1. Meningkatkan pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik 2. Meningkatkan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat 3. Meningkatkan pembinaan undang-undang tentang ormas, pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	Program Peningkatan peran partai dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

2.2. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.975.633.804,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rp, 1.117.417.700,-	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RP. 61.560.743.000,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.300.000.000,-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 163.474.000,-	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 323.408.400,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d 84	Berhasil
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil
4.	<55	Kurang Berhasil

3.1. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	82	80	97,56%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80	80	100%

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 :
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa
Indikator 1 :
Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 1 tahun 2024

Tabel 3.3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 1 tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Jumlah yang Paham terhadap makna kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap kesatuan bangsa	82	80	97,56

Gambaran kinerja ke indikator tersebut sebagai berikut:

Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa, yang merupakan salah satu Indikator Kinerja dengan capaian kinerja 97,56%, bahwa Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, walaupun pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 belum mencakup keseluruhan program yang dituangkan dalam RPJMD. Akan tetapi tetap disesuaikan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Indikator Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dapat berjalan dengan didukung pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik. Target Indikator Sasaran I yang seharusnya 82% dengan Realisasi 80% dari realisasi tersebut dapat kita lihat capaian kinerja tidak tercapai.

Berikut ini sebagai pelaksanaan Kegiatan untuk Mendukung Indikator I sebagai Berikut:

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan





Sumber Foto. Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangs, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pelaksanaan Paskibraka Tahun 2024)



Sumber Foto: Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa

2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah

Tabel 3.4 Daftar Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Tahun 2024

No	Nama Ormas	Besaran Hibah (Rp)	Nama Pimpinan Penerima Bantuan	Alamat Penerima
1	Jejaring Panca Mandala (JPM)	300.000.000	Dr.Corry, Msi.	Pematang Raya Kabupaten Simalungun
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	150.000.000	Drs.H.Mhd Nurdin Panjaitan, MA	Jl.Sangnawaluh KM.4 Pematang Siantar
3	Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG)	100.000.000	Pdt.Jhon Maikel P.Siregar, M.Th	Jl.Asahan KM.5 NO.196 Desa Pantoan Maju Kec.Siantar Simalungun
4	Ikatan Pemuda Karya (IPK)	30.000.000	Martogi Sinaga, SE	Jl.Asahan Komplek Griya Huta Melati Nagori Siantar Estate Kec.Siantar Kabupaten Simalungun
5	PC Nahdlatul Ulama	30.000.000	H. Sakoanda Siregar, S.Ag	Jl.Asahan KM.IV NO.117 B Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
6	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)	30.000.000	Asmen,S.Pd.,MM	Jl.Merdeka No.18 Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun
7	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)	30.000.000	Andar Abdi Saragih,S.Pd,M.Si	Jl.Sutomo NO.10 Kel.Sinda raya Kec.Raya Kabupaten Simalungun
8	MD KAMHI	25.000.000	H.Bakhtiar Sinaga, SH	Jl.AsahanimalungunKM.28 Kel.Kerasaan I Kec.Pematang bandar Kab.Simalungun
9	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	25.000.000	H.Sulaiman Sinaga	Jl.Asahan KM 4 Nagori Dolok Marlawan Kec.Siantar Kab.Simalungun
10	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	25.000.000	Suparlik	Jln.Merdeka No.58 Lingkungan IV Kota Kel.Serbalawan Kec.Dolok Batu Nanggar
11	Pungun Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Wilayah Parapat Kab.Simalungun	25.000.000	Benris Simbolon	Jln.Sisingamangaraja No.213 Lingkungan II Kel.Parapat
12	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)	25.000.000	Hj.Hidayah Herlina Gusti Nasution	Jl.asahan KM.28 Kel.Kerasaan I Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun

13	Pemuda Karya Nasional (PKN)	25.000.000	Juni Pardomuan Saragih, SE	Jl.Sutomo NO.1 Sondi Raya Kec.raya Kab.Simalungun
14	Pemuka Agama Mitra Kamtibmas (PAMK)	25.000.000	H.Amrisyam Simamora, S.Ag.MA	Kompleks Polres simalungun Jl.Jhon Horalim Saragih Pematang Raya Kab.Simalungun
15	Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia-Pembaharuan (PGPI-P)	25.000.000	Pdt.Leo Muba Tampubolon	Jl. Sandang Pangan Ujung No.2C Perdagangan III Kec. Bandar Kab.Simalungun
16	Ikatan Pemuda Buntu Turunan (IPBT)	25.000.000	Tiru Manurung	Huta III Parbeokan Nagori Buntu Turunan Kec.Hatonduhan Kab.Simalungun
17	Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)	25.000.000	Pdt.Drs.Mardison Simanjorang, STh.M.Hum	Perumahan Cemara Mas Blok A2 No.22 Desa Simbolom Tengkoh Kec.Panombeian Panei
18	Pemuda Pancasila 1959	25.000.000	Agus Irawan Sinaga,SH	Batu Dua Puluh, Nagori Sigodang, Kec.Panei Kab.Simalungun
19	Pujakesuma	25.000.000	H.Girun	Jl.Merdeka Huta I Nagori Partimbangan Kec.Bandar Masilam Kab.Simalungun
20	Panti Asuhan Zarfah HKI	25.000.000	Bernhard Damink, SE	Jl.Parapat km.10 Bah Sampuran Balata Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun
21	DPC Pemuda Batak Bersatu	25.000.000	Sanggap Saragih	Jl. Asahan Km 3 Komplek Griya Siantar Kec.Siantar Kab.Simalungun
22	Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia	25.000.000	Frita Eva Lisna Purba	Urung Raya Nagori Raya bayu Kec.Raya kab.Simalungun
23	Keamanan Ketertiban Masyarakat Indonesia	25.000.000	Pantas Silaban	Jl.Sisingamangaraja Tigarunggu Kec.Purba Kab.Simalungun
24	Lembaga Gerakan Mencintai Firman Oikumene (GMF Oikumene)	25.000.000	Pdt.Danris Purba,M.Th	Dusun Sipingan Nagori Tiga Bolon Kec.Sidamanik Kab.Simalungun
25	Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI)	25.000.000	Pdt.Hotmarisi V.Pakpahan, S.Th	Saribu Jawa ujung Bondar Kec.Dolok Panribuan Kab.Simalungun
26	Ikatan Pengusaha Muslimah Kabupaten Simalungun (IPEMI)	25.000.000	Hj.Dra.Hidayah Herlina Gusti Nasution	Jl.Medan Km.10 No.43 Sinaksak Kec.Tapian Dolok Kab.Simalungun
27	Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI)	25.000.000	Sutrisno	Jl.Arjosuri Huta II Nagori Karang Rejo Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun
28	Forum Komunikasi Pelayanan Gereja (FKPG)	25.000.000	Pdt.Permai Sihombing, S.T.h	Gereja GSJA Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
JUMLAH		1.195.000.000		

Sumber Data: Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



Sumber Foto: Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Ormas

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



Sumber Foto: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis Indikator 1 : Persentase Pemahaman Politik Masyarakat

Tabel 3.5. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 2 tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80	80	100

Gambaran kinerja ke indikator tersebut sebagai berikut:

Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa, yang merupakan salah satu Indikator Kinerja dengan capaian kinerja 100%, bahwa Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, walaupun pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 belum mencakup keseluruhan program yang dituangkan dalam RPJMD. Akan tetapi tetap disesuaikan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Indikator Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dapat berjalan dengan didukung pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik. Indikator Sasaran dengan Target 80% dapat terealisasi 80%, dari realisasi tersebut dapat kita lihat capaian kinerja Sasaran 2 tercapai.

Berikut ini sebagai pelaksanaan Kegiatan untuk Mendukung Indikator I sebagai Berikut:

- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik
Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Foto Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilihan Pemula Pilkada Serentak Tahun 2024



- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Tabel 3.6. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah Tahun 2024	Besaran Bantuan/1 (satu) Suara (Rp)	Tata Cara Penghitungan Bankeu Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024								Jumlah Bantuan Yang diterima (Rp)	Ket.
1	Partai Golkar	9	83.109	4000	9	:	12	x	4000	x	83.109	Suara	249.327.000	9 Bulan
2	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	8	83.047	4000	9	:	12	x	4000	x	83.047	Suara	249.141.000	9 Bulan
3	Partai Demokrat	7	64.515	4000	9	:	12	x	4000	x	64.515	Suara	193.545.000	9 Bulan
4	Partai Gerindra	6	54.179	4000	9	:	12	x	4000	x	54.179	Suara	162.537.000	9 Bulan
5	Partai Nasdem	5	47.051	4000	9	:	12	x	4000	x	47.051	Suara	141.153.000	9 Bulan
6	Partai Hanura	4	29.504	4000	9	:	12	x	4000	x	29.504	Suara	88.512.000	9 Bulan
7	Partai Perindo	4	27.367	4000	9	:	12	x	4000	x	27.367	Suara	82.101.000	9 Bulan
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	20.860	4000	9	:	12	x	4000	x	20.860	Suara	62.580.000	9 Bulan
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	18.893	4000	9	:	12	x	4000	x	18.893	Suara	56.679.000	9 Bulan
10	Partai Amanat Nasional	1	17.196	4000	9	:	12	x	4000	x	17.196	Suara	51.588.000	9 Bulan
11	Partai Berkarya	1	6.861	4000	9	:	12	x	4000	x	6.861	Suara	20.583.000	9 Bulan
JUMLAH			452.582										1.357.746.000	

Tabel 3.7. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Peroleha n Kursi	Peroleha n Suara Sah Tahun 2024	Besaran Bantuan/ 1 (satu) Suara (Rp)	Tata Cara Penghitungan Bankeu Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024								Jumlah Bantuan Yang diterima (Rp)	Ket.
1	Partai Golkar	15	142.483	4000	3	:	12	x	4000	x	142.483	Suara	142.483.000	3 Bulan
2	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	8	78.675	4000	3	:	12	x	4000	x	78.675	Suara	78.675.000	3 Bulan
3	Partai Gerindra	7	60.402	4000	3	:	12	x	4000	x	60.402	Suara	60.402.000	3 Bulan
4	Partai Nasdem	6	57.693	4000	3	:	12	x	4000	x	57.693	Suara	57.693.000	3 Bulan
5	Partai Demokrat	5	36.700	4000	3	:	12	x	4000	x	36.700	Suara	36.700.000	3 Bulan
6	Partai Perindo	4	37.015	4000	3	:	12	x	4000	x	37.015	Suara	37.015.000	3 Bulan
7	Partai Hanura	2	21.374	4000	3	:	12	x	4000	x	21.374	Suara	21.374.000	3 Bulan
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	21.416	4000	3	:	12	x	4000	x	21.416	Suara	21.416.000	3 Bulan
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	13.170	4000	3	:	12	x	4000	x	13.170	Suara	13.170.000	3 Bulan
10	Partai Gelora	1	7.809	4000	3	:	12	x	4000	x	7.809	Suara	7.809.000	3 Bulan
JUMLAH			476.737									476.737.000		

Sumber Data: Bidang Politik Dalam Negeri

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Penandatanganan NPHD KPU



- Panandatanganan NPHD Polres dan Kodim



Sumber Foto: Bidang Politik Dalam Negeri

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2024

Tabel 3.8. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	64,15	70	82	80	97,56%

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	59,75	70	80	80	100%
---	--	-------	----	----	----	------

Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan Persentase Pemahaman Politik Masyarakat untuk 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat di mana hal ini dilihat dari data jumlah program yang dilaksanakan. Kenaikan jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2022, Tahun 2023 dan kemudian jumlah programnya Meningkat pada tahun 2024 disebabkan oleh penyesuaian prioritas pembangunan daerah dimana pada Tahun 2024 diadakannya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Tabel 3.9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	80	85	94.11%
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80	84	95,23%

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target tahun akhir renstra pada tahun 2026 berdasarkan evaluasi kinerja selama 3 tahun capaian kinerjanya akan selalu menyesuaikan dengan tema pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
		Tidak ada perbandingan dengan Standar Nasional		

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.11. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	82	80	97,56%	Kegagalan (Kelengkapan berkas administrasi yang kurang lengkap)	Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80	80	100%	Keberhasilan (sesuai target dan realisasi)	Melaksanakan Program Kegiatan Pendukung
---	--	----	----	------	--	---

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Penyajian atas penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	82	80	98	2.904.300.100	2.675.702.400	92,13	5,4%

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80	80	100	61.560.743.000	61.525.070.000	99,94	0,1%
---	--	----	----	-----	----------------	----------------	-------	------

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.13. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	96,56	1.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 4.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	96,56%	Menunjang	Peningkatan Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa didukung Program Kegiatan, maupun Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kinerja

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	1. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	100%	Menunjang	Penyampaian Pemahaman Politik di Tengah tengah Masyarakat sangat Kondusif dengan pelaksanaan Program, Kegiatan satuan Kerja
---	--	-----	--	---	------	-----------	---

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 70.440.676.904,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 69.736.944.261,- atau sebesar 99%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 persentase realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun mengalami Penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.14. Realiasasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.975.633.804	5.536.171.861	92,64
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.899.600	33.895.600	99,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.694.862.204	3.317.993.003	89,80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.000.364.000	1.971.659.548	98,57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.038.000	154.506.816	84,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.470.000	58.116.894	90,15
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.117.417.700	1.079.643.400	96,62
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.117.417.700	1.079.643.400	96,62
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.560.743.000	61.525.070.000	99,94
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	61.560.743.000	61.525.070.000	99,94
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.3000.000.000	1.975.000.000	91,92
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.3000.000.000	1.975.000.000	91,92

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	163.474.000	158.191.000	96,77
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	163.474.000	158.191.000	96,77
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	163.474.000	158.191.000	96,77
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	323.408.400	242.868.000	75,10
	JUMLAH	70.440.676.904	69.736.944.261	99,00

Tabel 3.15 Perbandingan capaian realisasi anggaran 2021 - 2024

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	5.786.987.353,-	5.486.874.131,-	94,81
2	2022	8.662.749.789,-	7.628.000.744,-	88,06
3	2023	41.398.890.944	41.068.839.694	99,20
4	2024	70.440.676.904	69.736.944.261	99,00

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,28% di mana secara umum program kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai target namun masih terdapat indikator yang belum tercapai secara optimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya.
2. Untuk kinerja keuangan, dari total anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.70.440.676.904,- yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun terealisasi sebesar Rp 69.736.944.261,- atau 99%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh perubahan regulasi pada saat tahun anggaran berjalan berpengaruh kepada serapan anggaran dan dalam beberapa item rincian kegiatan terkait terdapat harga satuan masih terlalu tinggi sementara pada beberapa rincian kegiatan lainnya harga satuan relatif rendah dibandingkan harga pasar sehingga mengakibatkan SiLPA.

Langkah ke depan yang akan dilakukan adalah :

1. Dalam rangka meningkatkan Persentase Masyarakat yang Paham terhadap kesatuan bangsa dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders perencana untuk penyusunan dokumen perencanaan Program Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa.
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
2. Dalam rangka Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2. Pohon Kinerja Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIPI N NAINGGOLAN, SH.

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SIMALUNGUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADIPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H

Jabatan : BUPATI SIMALUNGUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H

Pihak Pertama,

ARIPI N NAINGGOLAN, SH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIMALUNGUN

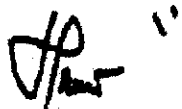
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	80

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.975.633.804,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rp. 1.117.417.700,-	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RP. 61.560.743.000,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.300.000.000,-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 163.474.000,-	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 323.408.400,-	APBD

Pematang Raya, 2024

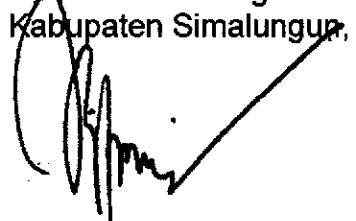
Pihak Kedua,

BUPATI SIMALUNGUN,



RADIAPOH HASIROLAN SINAGA, S.H.,M.H

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Simalungun,



ARIPIN NAINGGOLAN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196701181996101001

A. POHON KINERJA

Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun sebagaimana terlihat di bawah ini

VISI . RAKYAT HARUS SEJAHTERA MISI 3 . Penerapan GCG (Good and Clear Government)

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif

